



LAPORAN ANALISIS MEDIA

HUMAS JATENG
(03 Januari 2025)





PEMPROV JATENG RILIS RELAKSASI PKB & BBNKB

1. Pemprov Jateng mengeluarkan relaksasi atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) selama 3 bulan ke depan. Kebijakan langsung dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di tengah pelaksanaan opsen pajak yang dimulai 5 Januari mendatang. Adapun relaksasi pajak tersebut berupa pengurangan PKB sebesar 13,49 % plus BBNKB 24,70 %. Dijelaskan Kepala Bapenda Provinsi Jateng, Nadi Santoso, relaksasi PKB dan BBNKB akan diberlakukan (1/1/2025 - 31/3/2025).
2. Kepala Bapenda Provinsi Jateng sebut kondisi ekonomi masyarakat di Jateng menjadi dasar diberlakukan relaksasi PKB dan BBNKB di Jateng. Kami berharap penerapan relaksasi PKB dan BBNKB bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
3. Kepala Bapenda Provinsi Jateng sebut opsen pajak bakal berdampak pada pendapatan pajak kabupaten kota di Jateng. Di mana kabupaten kota akan menerima pendapatan pajak lebih banyak dari pada dana bagi hasil. Jika sebelumnya penerima pajak harus menunggu setiap bulan, sekarang kabupaten kota bisa langsung menerima pendapatan pajak setiap hari. Hasil opsen pajak juga bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur secara langsung tanpa menunggu.
4. Kabid PKB Bapenda Provinsi Jateng, Danang Wicaksono sebut pendapatan PKB di Jateng 2024 minus di angka 0,64 %. Tak hanya itu, kepatuhan membayar PKB juga berkurang dari 84,6 % pada 2023 jadi 82 % lebih pada 2024. Meski demikian ia mengaku penurunan tersebut masih lebih baik dari provinsi lainnya.
5. Kabid PKB Bapenda Provinsi Jateng sebut guna meningkatkan kepatuhan pajak, berbagai langkah dilakukan. Seperti Samsat Budiman dan Samsat Corporate di 800 titik yang tersebar di Jateng. Tak hanya itu, Danang mengatakan di setiap desa di Jateng juga telah terjadi layanan pembayaran PKB.
6. Kabid PKB Bapenda Provinsi Jateng sebut untuk itu kami akan mendorong kepatuhan pajak melalui BUMDES. Bahkan Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga mulai bergabung untuk membuka layanan pembayaran PKB dan akan dimulai di Brebes. Agar, masyarakat yang memiliki kendaraan dan tidak digunakan di jalan raya atau hanya untuk koleksi juga bisa mengajukan penghapusan pajak kendaraan bermotor.



REFLEKSI AKHIR TAHUN & CAPAIAN KINERJA 2024

1. Menjelang tutup tahun, Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana menyampaikan refleksi dan evaluasi atas kinerja 2024. Evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menyongsong kinerja ke depan, di kantornya, Selasa (31/12/2024).
2. Upaya mengatasi pengangguran juga telah menuai hasil. Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2024 mencapai 4,78% pada Agustus 2024. Persentase itu mengalami penurunan 0,35% dibandingkan pada 2023 yang mencapai 5,13 %.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Jawa Tengah pada 2024 mencapai 73,87. Kondisi ini tumbuh 0,65 % atau meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 73,39.
4. Pj. Gubernur Jateng sebut untuk bidang infrastruktur, Pemprov Jateng memastikan, 91,19 persen kondisi jalan provinsi sudah berstatus mantap pada akhir triwulan III 2024. Begitu juga dengan jembatan, yang mencapai 81,68 %. Serta, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat tidak mampu, juga terus digenjut. Hingga 2024, Pemprov Jateng berhasil merenovasi total 1.071.002 unit RTLH. Khusus tahun ini saja, RTLH yang direnovasi sebanyak 17.325 unit. Jumlah tersebut tersebar di 35 kabupaten/ kota.
5. Pemprov Jateng membangun jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pemalang-Batang-Pekalongan (Petanglong), tepatnya di Kabupaten Pekalongan sepanjang 4,70 km dan Kota Pekalongan sepanjang 3,70 km.
6. Pj. Gubernur Jateng sebut dalam penanaman modal, kinerja investasi Jateng juga cukup menggembirakan. Hingga triwulan III 2024, total penanaman modalnya mencapai Rp 65,89 triliun, atau 82,26% dari target Rp 80,1 triliun.
7. Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024, Jateng menyabet juara umum. Pun dengan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, juga meraih peringkat keempat.
8. Pada pemilu 2024, partisipasi pemilihnya mencapai 82,5%. Sedangkan pada Pilkada serentak 2024, partisipasi pemilihnya mencapai 73,04%.



BAZNAS-MUI LAUNCHING BUKU PENANGANAN STUNTING

1. Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah meluncurkan buku “Penanganan Stunting Ditinjau dari Berbagai Aspek”. Peluncuran ditandai penyerahan Buku oleh Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji kepada Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana di sela-sela Istighotsah dan Doa Bersama malam Tahun Baru 2025 di Gradhika Bhakti Pradja, Jalan Pahlawan Semarang.
2. Ketua Baznas Jateng, KH Ahmad Darodji sebut Sejak lahir 26 Juli 1975M/ 7 Rajab 1395H MUI memiliki fungsi sebagai pelayan umat (khadimul ummah), pelindung umat (Himayatul Ummah) dan mitra pemerintah (Shodiqul Hukumah). Tuntutan tiga fungsi itu yang menyebabkan MUI menjadi rumah besar bagi umat Islam untuk bertanya berbagai persoalan kehidupan termasuk persoalan stunting
3. Ketua Baznas Jateng sebut melalui berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh Baznas sendiri, maupun bekerja sama dengan instansi pemerintah, ormas Islam dan lembaga kemasyarakatan seperti pesantren Baznas berperan penting dalam upaya menangani kasus stunting di wilayah tersebut.
4. Ketua Baznas Jateng sebut stunting juga berdampak pada penurunan literasi seseorang, karena kekurangan gizi yang dialami akan berpengaruh pada kemampuan pikirnya. Ini tentu akan mengurangi kualitas SDM yang akan menjadi andalan kita untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang sudah menjadi komitmen kita untuk mewujudkannya.

RAPAT KOORDINASI TERBATAS BIDANG PANGAN

1. Pemprov Jateng melakukan gerak cepat mendukung program pemerintah pusat merealisasikan target swasembada pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional. Hal itu terlihat saat Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Selasa (31/12/2024).
2. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jateng. Ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya Jabar dan Lampung, untuk membahas program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan. Soal penyuluh akan jadi kunci. Diketahui, penyuluh tidak hanya padi tapi hortikultura, dan lainnya. Untuk mendukung semangat para petani, pemerintah akan membeli hasil pertaniannya. Serta, mulai 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam.
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan untuk turut serta menyukseskan program swasembada pangan, anggaran untuk dana desa pada 2025 Rp70 triliun. Dari jumlah tersebut 20 persennya wajib untuk ketahanan pangan. Yandri pinta bupati dan camat se-Jateng, 2025 fokus ketahanan pangan.
4. Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana sebut dalam hal swasembada pangan ini perlu adanya kebersamaan, kerja sama dan sinergi dari pusat sampai daerah, ini harus menyambung, saling membantu, saling mendukung dari pusat sampai daerah. Start sudah dimulai, tahun 2025 sudah mengurangi impor padi, gula, garam, jagung. Serta, masalah perkembangan distribusi pupuk. Memang pupuk ini menjadi kendala. Sekarang sudah mulai bagus artinya pemerintah memperhatikan, pendistribusian sampai ke kios-kios sudah jelas. Kemudian masalah pemberdayaan peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Jadi ini merupakan investasi untuk Indonesia ke depan. Mulai anak-anak, anak-anak kita ini harus memiliki asupan makan yang bergizi.
5. Pj. Gubernur Jateng sebut pemprov Jateng berkomitmen untuk meningkatkan pangan. Walaupun Jateng diakui merupakan salah satu lumbung pangan nasional, atau lumbung padi nasional, namun pihaknya tetap akan meningkatkan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
6. Pj. Gubernur Jateng sebut masalah perbaikan budidaya ikan juga disinggung dalam rakor bidang pangan tersebut. Diharapkan, sebagai negara maritim, kebutuhan ikan yang kaya vitamin bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Sementara itu, untuk masalah irigasi, Nana menuturkan, di Jawa Tengah saat ini kondisi irigasi baru 33,7 persen dalam kondisi baik. Selebihnya mayoritas rusak ringan, kemudian lainnya rusak. Sedangkan untuk kabupaten/ kota yang tidak memiliki anggaran, maka akan ditarik ke atas atau dibantu pemerintah pusat.



EKS ANGGOTA JI DEKLARASI EPMBUBARAN

1. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.
2. Yusril sebut Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden.
3. Yusril sebut tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi. Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan
4. Yusril sebut Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Yusril sebut pembubaran tersebut telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila.



PENGUMUMAN UMK, UMSK & UMSP JATENG 2025

1. Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Tengah Tahun 2025, Rabu (18/12/2024). Besaran UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.
2. Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan, UMK 2025 tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp3.454.827, dan terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp.2.170.475. Rata-rata kenaikan UMK Tahun 2025 sebesar Rp.148.742. Kenaikan UMK tahun 2025 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, masing-masing sebesar 6,5 % dari UMK 2024. Sedangkan untuk UMSK 2025, terdapat dua daerah yang ditetapkan, yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Nilai UMSK ini lebih tinggi dari UMK 2025.
3. Pj. Gubernur Jateng sebut UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu, yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sektor tersebut memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu juga ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.
4. Pj. Gubernur Jateng sebut juga mengumumkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah tahun 2025. Upah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/44 Tahun 2024 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.
5. Pj. Gubernur Jateng sebut UMK itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar hal tersebut, bisa dikenai sanksi.
6. Pj. Gubernur Jateng sebut kebijakan itu berlaku mulai 1 Januari 2025. Dengan ditetapkan UMK, UMSK, dan UMSP Jawa Tengah 2025 ini, diharapkan agar perusahaan-perusahaan yang di Jawa Tengah bisa menyesuaikan ketentuan yang berlaku.



1. PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERPILIH DIUNDUR MARET

- Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.
- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden Yang baru, (2/1).
- **Pelantikan diundur karena MK akan menyelesaikan seluruh perkara PHPU dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025.**

INSIGHT

MEDIA SOSIAL

EKPOSE Medsos

ISU NASIONAL



<https://x.com/detikcom/status/1875007675039199652>



<https://x.com/detikcom/status/1874795276269150710>

X.COM	: 209
FACEBOOK	: 6
YOUTUBE.	: 2
INSTAGRAM	: 3
ONLINE NEWS	: 14
TOTAL	: 234

GIAT PIMPINAN



<https://www.facebook.com/share/p/1F92cAXWiV/>

ISU JATENG



Memasuki 2025, harga Kebutuhan bahan pokok masyarakat yaitu cabai kian melangit di Kabupaten Batang sebab stok berkurang karena cuaca ekstrem sejak akhir tahun 2024. Salah seorang pedagang di Pasar Batang, Nurlaela mengatakan harga cabai naik berkisar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per-Kg.

<https://x.com/heralddotID/status/1875000436257853743>

Warga dan Mahasiswa Geruduk Lokasi Penambangan Galian C di Desa Winong, Kendal

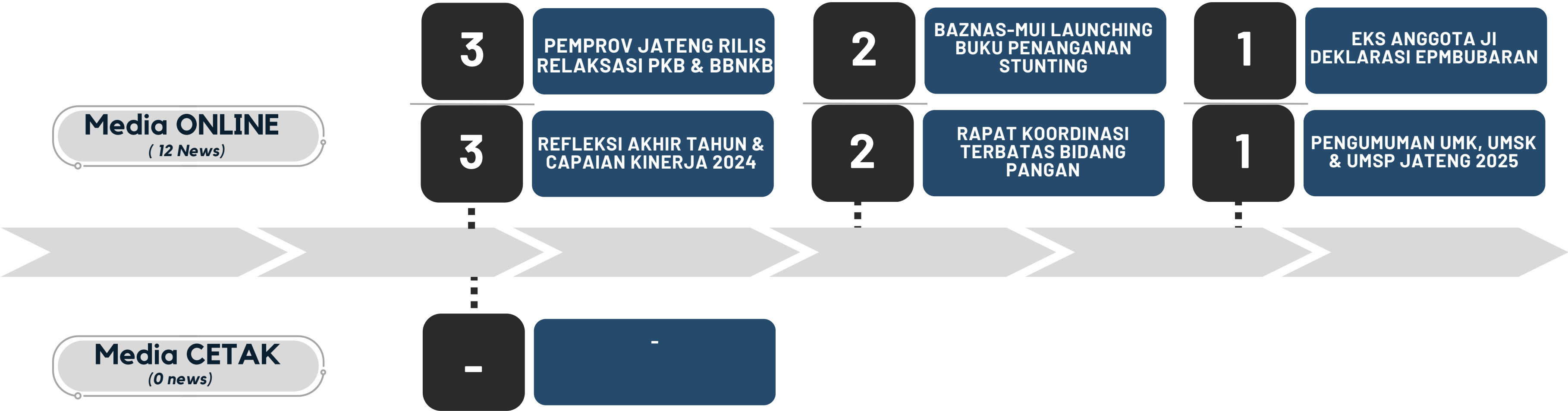
Sebabkan banyak kerusakan jalan, Galian C di Desa Winong, Kendal digeruduk warga dan mahasiswa. "Sekarang warga harus memutar jauh mencari jalan yang kondisinya juga tidak layak," kata salah satu warga, Aziz.

<https://x.com/JatengPos/status/1875007965859832214>



ISU PEMBERITAAN MEDIA

PJ NANA SUDJANA

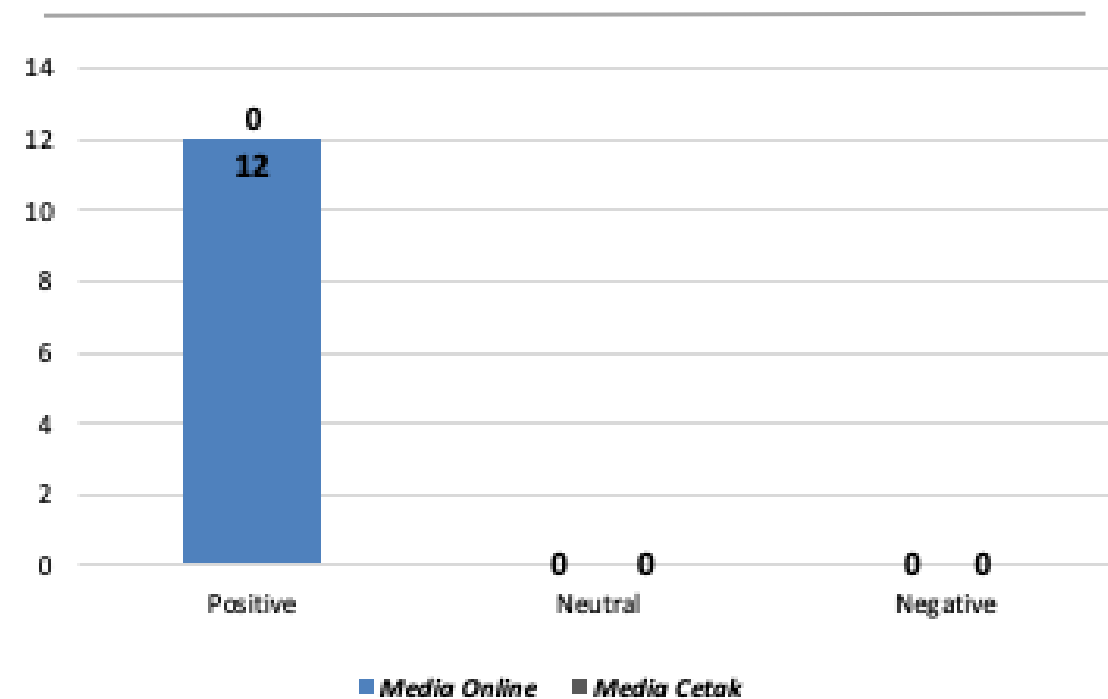
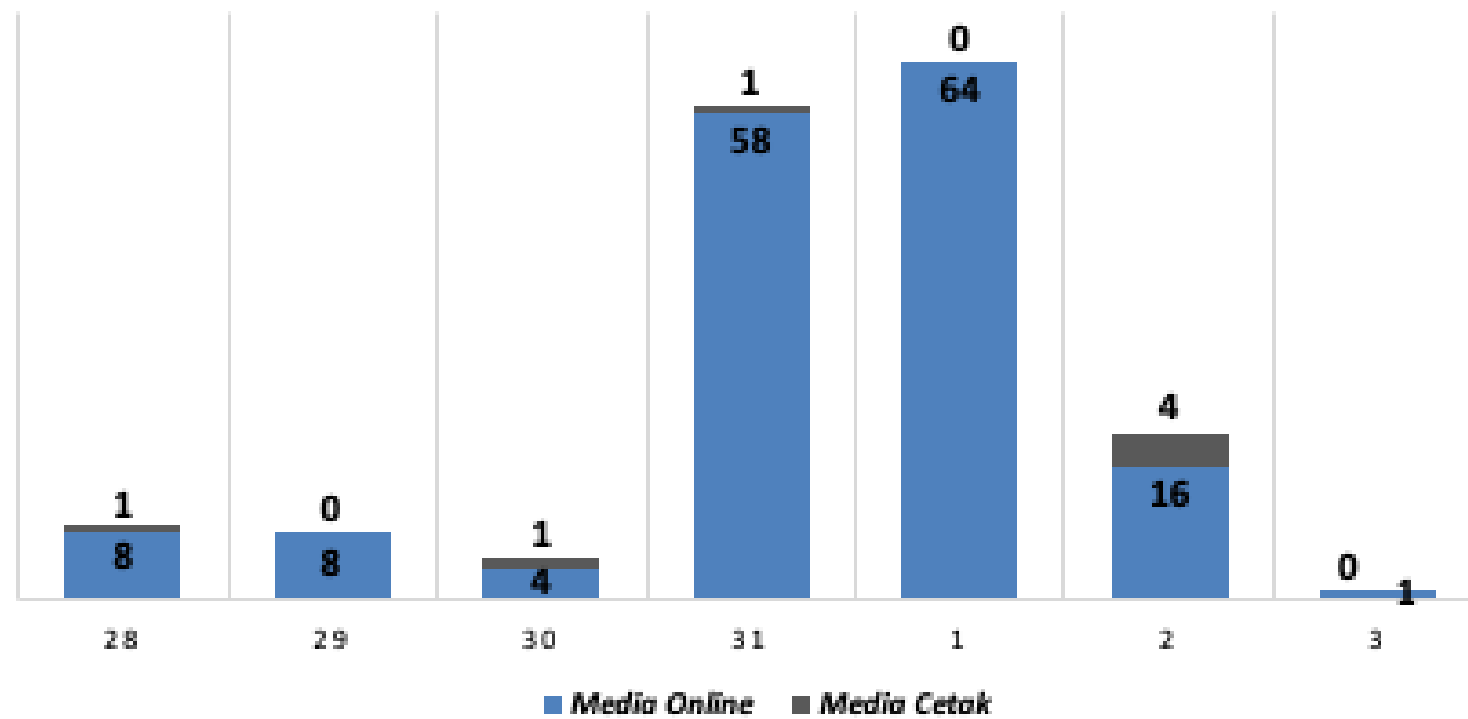


DAILY STATISTIC & MEDIA SHARE

PJ NANA SUDJANA

Daily Statistic

Media ONLINE & Media CETAK



Top 10 Media Share

Media ONLINE

